

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Jl. Prof. Dr. Sudiatmo  
KAWASAN PEMERINTAHAN BUKIT PELANGI  
SANGATTA

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai *time schedule* yang direncanakan. Renja Dinas Perhubungan ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya Renja Dinas Perhubungan ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua. Amin.

Sangatta, Februari 2024

Kepala Dinas,



**Joko Suropto, S.Sos, M.Si**

NIP. 19670918 200212 1 003

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.3.1. Maksud Penyusunan	I-7
1.3.2. Tujuan Penyusunan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
<b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN             LALU</b>	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA OPD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II-9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-26
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-5
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN             PERANGKAT DAERAH</b>	IV-1
4.1.	IV-1
<b>BAB V     PENUTUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LatarBelakang

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.**

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*) menjadi 'Instrument Penting' pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renja OPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian maka Renja OPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua OPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan berupa : persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi.

2. Penyusunan Rancangan Renja

Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renja dan Tahap Penyajian Rancangan Renja.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan penyempurnaan rancangan Renja, yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur.

4. Penetapan Renja

Penetapan Rancangan Renja OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Dinas Perhubungan, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan juga berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup:

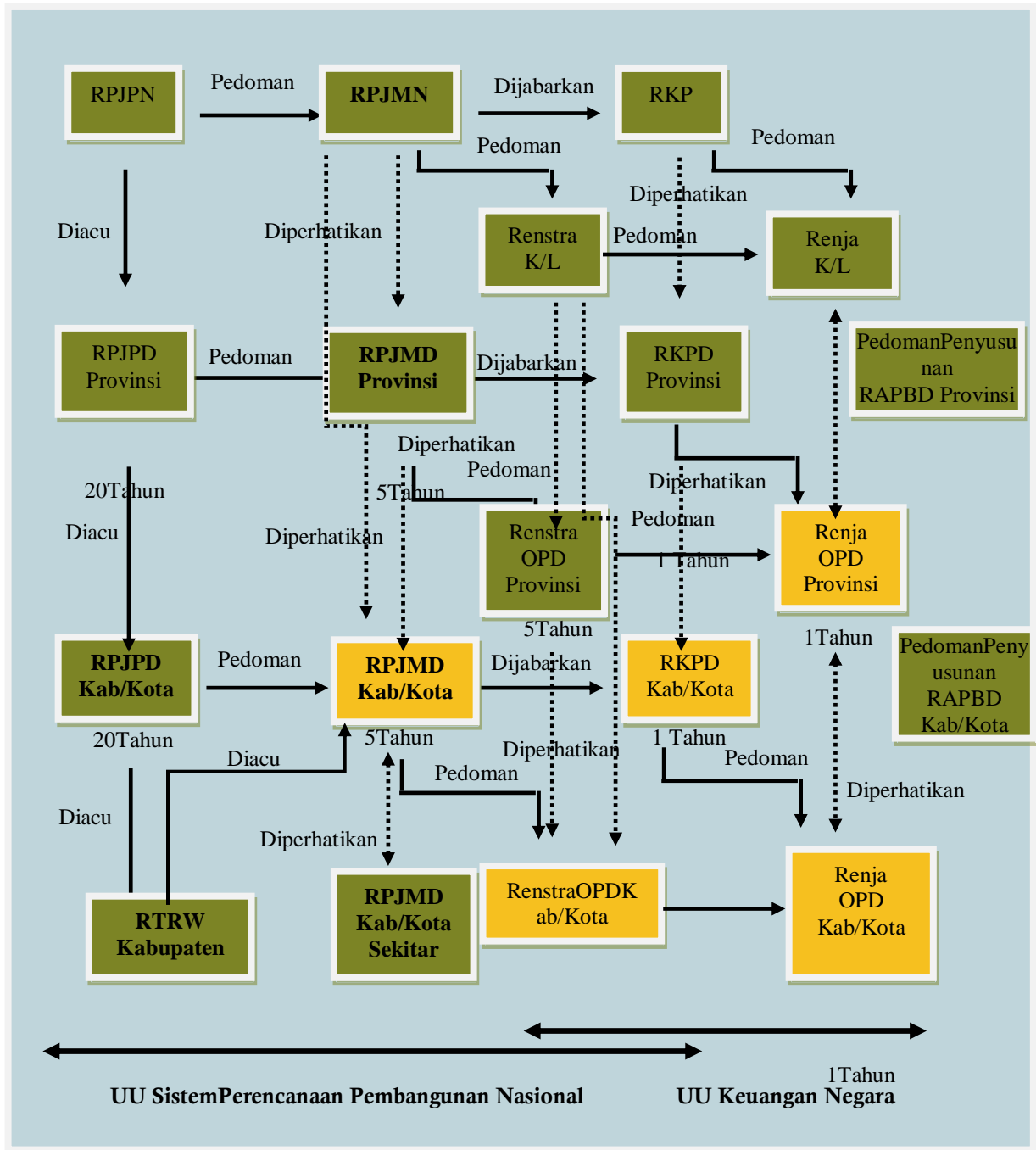
1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi dan
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan.
4. Akuntabilitas Kinerja OPD/Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada **komitmen** dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Harus merupakan suatu **sistem** yang dapat **menjamin** penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan **tingkat pencapaian** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus **berorientasi** pada **pencapaian** visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus **jujur, obyektif, transparan** dan **inovatif** sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. Berdasarkan diagram tersebut RKPD dan RENSTRA OPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renja OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2021;
  21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
  22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
  24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur untuk 1 (satu) tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2025.

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur selama 1 (satu) tahun yang selaras dengan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026.
2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2025.

### 1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan RKPD.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, untuk jangka pendek.
3. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renja Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU.**

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan juga capain RENSTRA OPD. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan juga review terhadap rancangan awal RKPD.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, dan juga Program dan Kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan Rencana Kerja beserta Rencana Pagu yang menjadi tupoksi Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah

**BAB IV. PENUTUP.**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain : penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024**

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Akhir Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		
			(4)		(8)		(10)		(11)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan			115.419.757.435	53%	62.159.393.947		148.730.852.755		84,42	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan			115.419.757.435	53%	62.159.393.947		148.730.852.755		84,42	
2.15.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan DISHUB	100	%	21.799.757.435	79	17.243.936.207	84.16%	23.077.497.798		84,16
2.15.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja	100	%	707.000000	52%		72.02%	252.082.516	100	72,02
2.15.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2	Dokumen	300.000.000	2	159.479.300	4	113.429.400	100	75,62
2.15.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lkj-IP	1	Dokumen	200.000.000	1	102.025.000	1	71.317.516	100	71,32
2.15.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	207.000.000	1	112.979.200	1	67.335.600	100	67,34

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	14.431.729.500	79%	11.535.797.480	81,68	14.139570.211	100	89,50
2.15.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang Terbayarkan	66	Orang/Bulan	10.740.772.960	69	8.689.851.963	70	11.407.331.362	100	81,54
2.15.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji TK2D yang Terbayarkan	76	Orang/Bulan	2.870.959.540	76	2.215.025.632	67	1.996.248.091	100	79,16
2.15.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium yang Terbayarkan	12	Bulan	470.000.000	12	377.859.725	1	629.915.788	100	96,91
2.15.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Keuangan	2	Dokumen	200.000.000	2	141.732.600	2	78.222.370	100	78,22
2.15.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1	Dokumen	150.000.000	1	111.327.560	1	27.852.600	100	55,71
2.15.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peserta yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	100	%	1.855.802.655	76%	1.414.496.610	72.4	943.372.099	72.4	84,99
2.15.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas (PDH dan PDL)	302	Stel	480.407.426	429	466.012.010	133	270.345.000	49.63	90,12
2.15.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan	70	Orang	985.395.229	97	722.200.835	36	312.477.121	80	76,21
2.15.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Badiyah dan Pelopor Pelajar	10	Orang	390.000.000	64	226.283.765	80	281.965.078	160	93,99
2.15.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100	%	1.500.000.000	63%	946.730.844	108.53	1.782.140.345	108.53	88,22
2.15.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	Paket	-	-	-	1	250.432.756	100	96,32

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	Jasa	400.000.000	4	306.383.864	7	302.780.081	100	84,11
2.15.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi	35	Kali	1.100.000.000	35	640.346.980	55	843.367.518	134.15	84,34
2.15.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1	385.559.990	100	96,39
2.15.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100	%	853.065.530	96%	822.775.515	160.91	3.872.542.698	160.91	93,70
2.15.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	140.000.000	2	130.828.800	6	2.683.283.278	100	91,74
2.15.001.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	11	Item	713.065.530	11	691.946.715	122	1.189.259.420	221.82	98,43
2.15.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Kantor	100	%	360.159.750	95%	342.950.500	100	303.698.415	100	53,56
2.15.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				1	13.133.980	100	6,57
2.15.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlahn Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Jasa	360.159.750	95%	342.950.500	11	290.564.435	100	79,17

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dalam kondisi baik	100	%	2.092.000.000	86%	1.806.701.758		1.784.091.514	100	92,49
2.15.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						35	335.887.950	109,38	76,34
2.15.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	Unit	700.000.000	32	477.352.801				
2.15.001.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3	Unit	162.000.000	3	160.513.408	144	86.567.000	480	97,27
2.15.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	980.000.000	1	933.516.778				
2.15.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	250.000.000	1	235.318.771	1	1.361.636.564	100	97,26
2.15.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Angkutan Darat	100	%	17.100.000.000	94	14.502.275.411	68,72	23.803.526.461	68,72	57,95
2.15.002.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang terpelihara	100	%	12.700.000.000	84	11.048.467.733		19.424.239.223		94,29

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.002.2.02.001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5	Unit	4.800.000.000	6	4.388.388.836	5	3.812.854.297	62,5	99,04
2.15.002.2.02.002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan PJU LED	15	Unit	6.850.000.000	15	6.074.442.977				
		Jumlah Pengadaan Rambu Jalan	241	Unit		243					
		Jumlah Pengadaan Marka Jalan	5000	M <sup>2</sup>		600					
		Jumlah Pengadaan Zoss	4	Titik		4					
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				310	14.686.473.248	91,18	94,75		
2.15.002.2.02.003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dokumen Perencanaan Median Jalan	1	Dokumen	300.000.000	-	19.330.600		314.785.800		62,96
2.15.002.2.02.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Traffic Light Yang Dipelihara	6	Unit	750.000.000	6	566.305.320	3	610.125.878	50	81,35
2.15.002.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pemenuhan Prasarana Terminal Penumpang Type C	100	%	1.190.000.000	93	1.108.542.068		1.002.468.694		13,23
2.15.002.2.03.001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Perencanaan Apresial	1	Dokumen	260.000.000	1	210.546.200	-	-	-	-
2.15.002.2.3.002	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.002.2.03.004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	3	Unit	930.000.000	3	897.995.868	-	-	-	-
2.15.002.03.005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang							139.507.120		2,10
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara						1	862.961.574	100	92,43
2.15.002.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	100	%	1.900.000.000	70	1.347.916.170		1.360.297.782		71,59
2.15.002.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	30	kali	1.600.000.000	15	1.129.408.550	9	1.026.794.180	75	68,45
2.15.002.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Forum LLAJ	12	Kali	300.000.000	8	218.507.620	9	333.503.602	150	83,38
2.15.02.2.07											
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						6	45.160.610	100	45,16
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi						6	40.571.600	100	40,57
2.15.002.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100	%	1.310.000.000	76	997.349.440				
2.15.002.2.08.001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Orang	150.000.000	54	81.653.380				
2.15.002.2.08.002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	5	Laporan	300.000.000	14	158.533.119				

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

		Kendaraan Bermotor										
2.15.002.2.08.004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	15	Kali	760.000.000	80	614.445.040	15	446.903.084	214.29	89,38	
2.15.002.2.08.005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	8	Kali	400.000.000	75	301.251.020					
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						15	575.836.228	375	95,97	
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya						6	101.550.475	37.5	50,78	
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						4	329.798.765	57.14	65,75	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum										
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)						-	-	-	-	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

		Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia										
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Jaringan Trayek										
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1	476.700.000	100	95,34	
2.15.003	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				73.850.000.000	38	28.090.143.330		101.849.828.496		94,58	
2.15.003.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut	70	%	500.000.000	67	338.410.660	100	213.459.034	100	53,36	
2.15.003.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Kali	500.000.000	6	338.410.660	8	213.459.034	100	53,36	
2.15.003.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Jaringan Trayek Sungai dan Danau						100	108.676.400		54,34	
2.15.003.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan						100	108.676.400	100	54,34	

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

	dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan izin persetujuan									
2.15.003.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pemenuhan Perizinan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	75	%	70.300.000.000	35	25.218.811.543		98.155.640		10,91
2.15.003.2.12.001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	Dokumen	300.000.000	1	222.273.920		300.370.981		60,07
2.15.003.2.12.002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen Review Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kenyamukan Sangatta	1	Dokumen	70.000.000.000	1	24.996.537.623	2	93.324.679.166	100	98,00
2.15.003.2.12.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.003.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Ketersediaan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau	100	%	2.350.000.000	80	1.894.668.597		7.902.642.915		69,57
2.15.003.2.13.002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	4	Unit	1.425.000.000	4	1.122.955.384	11	7.451.622.880	100	71,24
2.15.003.2.13.003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5	Unit	460.000.000	5	419.201.281	4	208.941.948	-	52,24
2.15.003.2.13.004/ 2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	15	Laporan	465.000000	13	352.511.932	1	242.078.087	100	48,42
<b>2.15.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Pengujian Kendaraan Bermotor</b>										

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Bermotor	5500	Unit	2.670.000000	87	2.323.038.999		4.955.962.971		98,53
2.15.002.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR	35	%	2.370.000.000	91	2.164.505.880		4.955.962.971		98,53
2.15.002.2.05.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Unit	916.260.364	1	912.604.183				
		Jumlah Pemeliharaan Prasarana (Semenisasi Lahan Parkir)	100	M <sup>3</sup>		66					
		Perbaikan Kantor Ruang Pengujian	1	Paket		1					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia					2	4.177.913.447	100	99,47	
2.15.002.2.05.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Orang	200.000.000	11	121.747.228	8	73.504.806	100	98,01
2.15.002.2.05.003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Kendaraan	3500	Dokumen	160.000.000	3884	142.950.000	4123	37.879.900	117,8	75,76
2.15.002.2.05.004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Elektronik	4500	BLUe	150.000.000	5000	144.950.000	5000	134.954.003	111,11	99,97
2.15.002.2.05.005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Kali	50.000.000	1	49.864.500	9	36.684.950	450	73,37
		Jumlah Benner									

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.15.002.2.05.006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	4	Kali	50.000.000	4	41.799.700	5	30.442.483	250	60,88
2.15.002.2.05.007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Kalibrasi Alat Uji dan Akreditasi	12	Ala	353.000.000	9	339.102.680	10	267.424.759	111.11	99,05
2.15.002.2.05.008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi	15	Kali	490.739.636	14	412.071.642	13	197.158.623	130	98,58

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Kutai Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan dan Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dan menurunnya angka kecelakaan	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR</i>	3.529	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	2.556	3.453	3.884	4.123			
		<i>Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis</i>													
		- Pelabuhan Laut (Kenyamukan, Maloy Lama, Maloy Baru, Tanjung Keramat)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		- Pelabuhan Udara (Uyang Lahai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Terminal Bis (Bengalon, Rantau Pulung, Kombeng, Kaliorang, Muara Bengkal, Sangatta Utara)	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Persentase Layanan Angkutan Darat</i>	23,63	9,38	9,57	9,76	9,96	10,16							
		<i>Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum</i>	26,71	56,91	58,05	59,21	60,39	61,60							
<i>Persentase Pemasangan Rambu-rambu</i>	20	20	20	20	20	20									

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

		<i>Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun</i>												
		- Jumlah ORANG melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	113.018	69.070	70.451	71.860	73.297	74.763			465.736	354.753		
		- Jumlah BARANG melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	950,21	88,04	89,80	91,60	93,43	95,30						

Dari Tabel 2.2 ( Kinerja Pelayanan) Dinas Perhubungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sebagian target kinerja belum tercapai secara optimal dikarenakan kurangnya disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu;
- Secara umum penyerapan anggaran tidak optimal dikarenakan oleh faktor eksternal, antara lain keterlambatan penetapan anggaran.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur merupakan **Unsur Pelaksana** tugas Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur disusun sesuai dengan satuan kerja eselon yang terdiri dari Kepala Dinas (Eselon IIb), Sekretaris (Eselon IIIa), dan 3 Kepala Bidang (Eselon IIIb). Sekretaris membawahi 2 Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 3 Kepala Seksi (Eselon IVb).

Secara rinci susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahi :
  - a. Sekretari
  - b. Bidang Perhubungan Darat
  - c. Bidang Perhubungan Laut
  - d. Bidang Perhubungan Udara
  - e. UPT. PKB
2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perhubungan Darat membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

- b. Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP)
  - c. Seksi Angkutan Darat
4. Bidang Perhubungan Laut membawahi :
- a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut
  - b. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Laut
  - c. Seksi Keselamatan Penumpang Laut
5. Bidang Perhubungan Udara membawahi :
- a. Seksi Teknis Bandara
  - b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengkoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.



Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan Perhubungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur :

#### **1. Kepala Dinas**

##### **a. Uraian Tugas Pokok**

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

**b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

**2. Sekretaris****a. Uraian Tugas Pokok**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan.

**b. Fungsi**

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dinas, kerjasama hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana
4. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan**

#### **a. Uraian Tugas Pokok**

Sub bagian Perencanaan program dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan Keuangan kegiatan tahunan, melaksanakan pengelolaan evaluasi dan pelaporan urusan keuangan , evaluasi dan pelaporan.

#### **b. Fungsi**

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, kegiatan, program, dan anggaran;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan;
3. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
4. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **4. Kepala Sub Bagian Umum**

#### **a. Uraian Tugas Pokok**

Sub bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola tata usaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya.

#### **b. Fungsi**

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
3. Melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah Dinas Perhubungan
4. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
6. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kersipan dan dokumentasi;
7. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana;
8. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
10. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
11. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. Uraian Tugas Pokok  
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- b. Fungsi
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
  3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

## **6. Seksi Lalu Lintas.**

- a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyimpanan bahan dan pembinaan teknis kegiatan lalu lintas.

b. Fungsi

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
2. Melaksanakan fasilitasi Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
3. Melaksanakan fasilitasi penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada Jalur Perkeretaapian Daerah;
4. Melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi/Daerah;
5. Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
6. Melaksanakan fasilitasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan tugasnya;
8. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
9. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7. **Seksi Angkutan.**

a. Uraian Tugas Pokok

Pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis angkutan.

b. Fungsi

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan darat untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
- b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

- c. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- d. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- e. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- f. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- g. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
- h. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- i. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- j. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- k. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan perairan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- l. Menyusun advis teknis/rekomendasi penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- m. Menyusun advis teknis/rekomendasi penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah
14. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
15. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha angkutan laut

Pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;

16. Penyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
17. Melakukan rumusan kajian Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
18. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
19. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugasnya;
20. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
21. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

## 8. Bidang Prasarana

### a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

### b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, Pengoperasian dan perawatan prasarana;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, Pengoperasian dan perawatan prasarana;

3. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, Pengoperasian dan perawatan prasarana; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

9. **Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana**

a. Uraian Tugas Pokok

pegnumpulan, penyiapan bahan dan pembina perencanaan dan pembangunan Prasarana.

b. Fungsi

1. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pelabuhan pengumpan lokal;
2. Menyusun penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau;
3. Menyusun penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah;
4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dan pembangunan
5. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
6. Menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
7. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
8. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
9. menyusun advis teknis/rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana

- perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugasnya;
  11. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
  12. melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

## 10. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana

### a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan perawatan Prasarana.

### b. Fungsi

1. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
4. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
5. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana;
6. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perawatan Prasarana;
7. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi
8. Perawatan Prasarana sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
9. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perawatan Prasarana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
10. Melaksanakan advis teknis izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
11. Melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
12. Melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan Sungai dan danau;
13. Melaksanakan advis teknis penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;

14. Melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan
15. Selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
16. Melaksanakan advis teknis penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Dearah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal;
17. Melaksanakan advis teknis izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretarian umum yang jaringan lalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - i. Pemberikan advis teknis/rekomendasi lokasi/lapangan penumpukan (*stockfail*);
18. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Prasaran; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

## 11. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

- a. Uraian Tugas Pokok  
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- b. Fungsi
  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;
  3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, dan keselamatan;  
dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 12. Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan

### a. Uraian Tugas Pokok

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan; dan pembinaan teknik Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

### b. Fungsi

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugasnya;
5. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

## 13. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan.

### a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan Keselamatan dan lingkungan Perhubungan,

### b. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan;
- b. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di Jalan Provinsi/Daerah yang meliputi daerah titik rawan kecelakaan
- c. Melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Melaksanakan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;

- e. Melaksanakan kegiatan dan operasional mobil derek;
- f. Melaksanakan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang perhubungan;
- g. Melakukan sosialisasi keselamatan penyedia dan pengguna jasa transportasi perhubungan diwilayah Daerah;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- i. Membuat advis teknis terkait izin pengurukan dan reklamasi;
- j. Memfasilitasi tanggapan dan masukan pengguna jasa transportasi terkait pelayanan dilingkungan perhubungan;
11. Melaksanakan dan evaluasi tentang terkait penghargaan dan prestasi dilingkungan perhubungan;
12. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

#### **14. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Uraikan Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan

#### **15. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

4. Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
7. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Kabupaten Kutai Timur**

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		
			(6)		(8)		
			K	RP	K	RP	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan			115.419.757.435		62.159.393.947	
2.15.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran	100	%	21.799.757.435	100	17.243.936.207
2.15.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pere	100	%	707.000.000	100	374.483.500
2.15.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	300.000.000		159.479.300
		Jumlah Dokumen Renja	2	Dokumen		2	
2.15.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	0	Laporan	200.000.000		102.025.000
		Jumlah Dokumen LKj-IP	1	Dokumen		1	
2.15.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	207.000.000	1	112.979.200
2.15.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan	100	%	14.431.729.500	100	11.535.797.480
2.15.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	Orang/bulan	10.740.772.960		8.689.851.963
		Jumlah Gaji dan Tunjangan P3K	2	Orang		9	
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang		60	
2.15.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	0	Dokumen	2.870.956.540		2.215.025.632
		Jumlah Gaji TK2D	76	Orang		76	
2.15.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	0	Dokumen	470.000.000		377.859.725
		Jumlah Bulan Pembayaran Honor	12	Bulan		12	
2.15.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	Laporan	200.000.000		141.732.600
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dokumen		2	
2.15.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1	Dokumen	150.000.000	1	111.327.560
2.15.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100	%	1.855.802.655	100	1.414.496.610
2.15.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	302	Stell	480.407.426	429	466.012.010
2.15.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Orang	985.395.229		722.200.835
		Jumlah Peserta Pelatihan	70	Orang		97	
2.15.001.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	0	Orang	390.000.000		226.283.765
		Abdiyasa dan Pelajar Pelopor	10	Orang		64	
2.15.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100	%	1.500.000.000	100	946.730.844
2.15.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0	Paket	-		
2.15.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	0	Paket	400.000.000		306.383.864
		Jumlah Bahan Logistik Kantor	4	Bahan/Alat		4	
2.15.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0	Laporan	1.100.000.000		640.346.980
		Jumlah Rapat Dan Konsultasi	35	Kali		35	
2.15.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100	%	853.065.530	100	822.775.515
2.15.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Unit	140.000.000		130.828.800
		Jumlah Kendaraan Patwal Roda 2	2	Unit		2	
2.15.001.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	-		
2.15.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit	713.065.530		691.946.715
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11	Item		11	
2.15.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	%	360.159.750	100	342.950.500
2.15.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	9	Jasa	360.159.750	9	342.950.500
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	Laporan			
2.15.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Dalam Daerah	100	%	2.092.000.000	100	1.806.701.758
2.15.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32	Unit	700.000.000	32	477.352.801
2.15.001.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	Item	162.000.000	3	160.513.408
2.15.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	980.000.000	1	933.516.778
2.15.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	250.000.000	1	235.318.771
2.15.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Bermotor	75	%	17.100.000.000	3884	14.502.275.411
		Jumlah KIR Kendaraan Bermotor	5500	Unit			
		Jumlah KIR Kendaraan Umum	5500	Unit			
2.15.002.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100	%	12.700.000.000	100	11.048.467.733
2.15.002.2.02.001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	Unit	4.800.000.000	2	4.388.388.836
		Jumlah Etle	2	Titik			
		Jumlah Halte Bus	3	Unit			

### 1.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (bottom up planning) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Jaring Aspirasi Masyarakat dari Konstituen DPRD Kabupaten Kutai Timur yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten tetapi yang dibahas di Forum OPD. Musrenbang Tingkat Kabupaten merupakan pembahasan akhir tentang usulan program/kegiatan prioritas yang didapatkan dari Kecamatan serta masukan dari stakeholder terkait sehingga diperoleh kesepakatan program/kegiatan prioritas kabupaten yang kemudian ditetapkan dan akan direalisasikan melalui APBD Kabupaten Kutai Timur.

Terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang nantinya dianggarkan dalam APBD Provinsi. Usulan program/kegiatan yang terealisasi merupakan program prioritas provinsi yang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Usulan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur disamping berdasarkan masukan dari kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian di lapangan baik yang dilakukan sendiri maupun masukan dari, Asosiasi-asosiasi dan LSM.

Untuk tahun 2021 usulan yang disampaikan melalui musrenbang kecamatan seperti tabel dibawah. Banyak usulan yang disampaikan dari aspirasi masyarakat mengenai pembangunan halte bus, pembangunan dermaga, pengadaan rambu-rambu lalu lintas, Zona Selamat Sekolah (ZOSS) tetapi tidak dilengkapi dengan data yang lengkap seperti dimana lokasi sekolah yang akan diusulkan untuk pembuatan ZOSS tersebut. Dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang

mengalami defisit anggaran, maka usulan/aspirasi masyarakat yang masuk belum dapat diakomodir oleh Dinas Perhubungan. Walaupun usulan tersebut tidak bisa direalisasikan, akan tetapi Dinas Perhubungan mengusulkan kegiatan seperti ZOSS, marka jalan, pembangunan dermaga dan kegiatan lainnya lewat APBN dan APBD I (Bankeu) Infrastruktur Publik Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Kutai Timur**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKP yang perlu diperhatikan adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional berupa benang merah antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten untuk tahun 2024.

**Tabel 3.1.**  
**Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024**

No	RKP TAHUN 2024	RKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024	RKPD KUTAI TIMUR TAHUN 2024
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;	Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang Mendukung Daya Saing SDM;	Penyediaan infrastruktur listrik, air, teknologi informasi & komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan <i>green-economy</i> dan pemenuhan pelayanan dasar
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;	Penguatan pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat;	Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan yang terstandarisasi

No	RKP TAHUN 2024	RKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024	RKPD KUTAI TIMUR TAHUN 2024
3.	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing;	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;	Peningkatan kualitas layanan pendidikan
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;	Penguatan konektivitas antar daerah, Kawasan dan IKN;	Peningkatan kualitas SDM menghadapi era Revolusi Industri 4.0 guna membentuk karakter berbasis budaya lokal serta mendorong inovasi dan kreativitas
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan public dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.	Penguatan <i>triple-agro</i> : agribisnis, agroindustri, dan agrowisata menuju daya saing daerah
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;		Peningkatan kemandirian pangan berkelanjutan berbasis masyarakat dan produk lokal untuk mendukung akselerasi penurunan <i>stunting</i>
7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan pelayanan publik.		Tata kelola pemerintah daerah yang adaptif menuju <i>smart city</i> dan pembangunan berkelanjutan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, berdasarkan urutan prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur dasar, dengan prioritas antara lain:
  - a. Penyediaan infrastruktur listrik, air, teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan *green-economy* dan pemenuhan pelayanan dasar
  - b. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan yang terstandarisasi
  - c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
2. Penciptaan Daya Saing Ekonomi Daerah
  - a. Peningkatan kualitas SDM menghadapi era Revolusi Industri 4.0 guna membentuk karakter berbasis budaya lokal serta mendorong inovasi dan kreativitas;
  - b. Penguatan *triple-agro*: agribisnis, agroindustri, dan agrowisata menuju daya saing daerah;
  - c. Peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan berbasis masyarakat dan produk lokal untuk mendukung akselerasi penanggulangan *stunting*;
  - d. Tata kelola pemerintah daerah yang adaptif menuju *smart city* dan pembangunan berkelanjutan; dan
  - e. Kesiapsiagaan dan mitigasi berbagai bencana serta pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dibidang Perhubungan;
2. Mengoptimalkan pelayanan dan fungsi sarana dan prasarana perhubungan;
3. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;
4. Mewujudkan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas dan keterjangkauan dalam pelayanan transportasi;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran RENJA Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Terpenuhinya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perhubungan;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani dan menurunnya angka kecelakaan berat;
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Untuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, terdapat 3 program, 17 kegiatan dan jumlah indikasi anggaran sebesar Rp 80.415.266.463,-.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERHUBUNGAN KAB. KUTAI TIMUR  
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						79.215.266.463,00							53.134.116.463,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						79.215.266.463,00							53.134.116.463,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						79.215.266.463,00							53.134.116.463,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dishub	100 % undefined			100 % undefined	29.542.266.463,00						100 % undefined	29.684.116.463,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%			-	900.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	100%	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%			-	20.765.266.463,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	100%	19.884.116.463,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				130 Orang/bulan	19.815.266.463,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		19.683.266.463,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%			-	1.285.985.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	100%	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				130 Paket	485.985.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			-	1.770.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100%	1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	320.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%			-	1.815.823.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100%	2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	700.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				161 Unit	1.115.823.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	667.100.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	100%	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	282.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				11 Laporan	385.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	2.338.092.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	100%	2.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	215.972.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	494.780.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				62 0	127.340.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	46.273.000.000,00						-	20.050.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	21,82% 21,82%			-	34.933.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	21,82% 21,82%	9.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit	4.660.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				350 Unit	28.227.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				21 Unit	946.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				6 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	100% 100%			-	6.000.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100% 100%	6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0009		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>				1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang direhabilitasi dan terpelihara</i>				3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semau, Kecamatan, Semau Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	1.240.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	100% 100%	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	740.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				8 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	100% 100%			-	1.300.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	100% 100%	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				20 Laporan	800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15.02.2.08.0008		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					8 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0009		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor					7 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	1.000.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100% 40%	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	1.800.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100% 100%	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	-	-			-	3.400.000.000,00						-	3.400.000.000,00	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	400.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	100% 100%	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	100% 100%			-	600.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	20% 20%	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	100% 100%			-	2.400.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	20% 20%	2.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				9 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				4 Unit	900.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		<b>UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>							<b>1.200.000.000,00</b>						<b>1.892.500.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>1.200.000.000,00</b>							<b>1.892.500.000,00</b>	
	<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>1.200.000.000,00</b>							<b>1.892.500.000,00</b>	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.200.000.000,00						-	1.892.500.000,00	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	22,06% 22,06unit			-	1.200.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	22,06% 22,06unit	1.892.500.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				11 Orang	42.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		42.500.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdftar</i>				3500 Unit	202.626.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		250.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				12 Unit	220.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		250.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					25 Laporan	294.874.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
<b>J U M L A H</b>								<b>80.415.266.463,00</b>							<b>55.026.616.463,00</b>	

---

# **BAB IV**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bidang Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini;

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PERHUBUNGAN KAB. KUTAI TIMUR  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						79.215.266.463,00							53.134.116.463,00	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						79.215.266.463,00							53.134.116.463,00	
	2.15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						79.215.266.463,00							53.134.116.463,00	
1.	2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dishub</i>	100 % undefined			100 % undefined	29.542.266.463,00						100 % undefined	29.684.116.463,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%			-	900.000.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	100%	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100%			-	20.765.266.463,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	100%	19.884.116.463,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				130 Orang/bulan	19.815.266.463,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sanggata Utara, Sanggata Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		19.683.266.463,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				3 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%			-	1.285.985.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	100%	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				130 Paket	485.985.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%			-	1.770.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100%	1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	320.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100%			-	1.815.823.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100%	2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	700.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				161 Unit	1.115.823.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	667.100.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	100%	700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	282.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				11 Laporan	385.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%			-	2.338.092.000,00			-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	100%	2.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	215.972.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				30 Unit	494.780.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			0				620	127.340.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	46.273.000.000,00						-	20.050.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	21,82% 21,82%			-	34.933.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	21,82% 21,82%	9.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				7 Unit	4.660.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				350 Unit	28.227.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				21 Unit	946.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan														
			<i>Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				6 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	100% 100%			-	6.000.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100% 100%	6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara				3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	1.240.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	100% 100%	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	740.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				8 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	100% 100%			-	1.300.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	100% 100%	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum															
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				20 Laporan	800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan															
			Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				8 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor															
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				7 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			-	100% 100%			-	1.000.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100% 40%	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	1.800.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	100% 100%	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	3.400.000.000,00						-	3.400.000.000,00	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	100% 100%			-	400.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-	100% 100%	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	100% 100%			-	600.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	20% 20%	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	100% 100%			-	2.400.000.000,00			-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	20% 20%	2.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun</i>				9 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				4 Unit	900.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan															
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>				1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							1.200.000.000,00							1.892.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.200.000.000,00								1.892.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						1.200.000.000,00								1.892.500.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	1.200.000.000,00						-		1.892.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	22,06% 22,06unit			-	1.200.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-	22,06% 22,06unit	1.892.500.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Orang	42.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		42.500.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</i>				3500 Unit	202.626.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		250.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2.15.02.2.05.0005		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				12 Unit	220.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		250.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				25 Laporan	294.874.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Peningkata n Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
<b>J U M L A H</b>								<b>80.415.266.463,00</b>							<b>55.026.616.463,00</b>	

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Kepala Dinas Perhubungan selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan di daerah kewenangan.
2. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban untuk menjabarkan kedalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan persetujuan Bupati.
4. Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan OPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).